



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )**

**SEKRETARIAT D P R D  
KAB.BANJARNEGARA  
TAHUN 2023**

**Jl. Pemuda Nomor 64 Banjarnegara Telp.(0286) 592634  
Banjarnegara 53414**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya kami telah dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan kewajiban seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

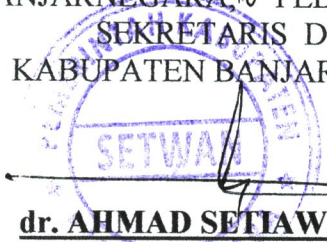
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 yang disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru dengan harapan untuk penyempurnaan perencanaan yang lebih baik dan terukur untuk pencapaian sasaran Organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai wujud komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengembangkan salah satu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan dukungan yang diberikan segenap aparatur di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Akhir kata, kepada seluruh Jajaran Pimpinan maupun SKPD terkait yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan SAKIP khususnya RKT ini kami ucapkan terimakasih.

BANJARNEGARA, 18 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA

  
**dr. AHMAD SETIAWAN, MPH**

Pembina Tk. I

NIP. 19720918 200501 1 008



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pada akhir tahun 2020, dalam rangka mengoptimalkan fungsi Sekretariat DPRD, terjadi perubahan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah merencanakan kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program 15 (Lima belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan. Dalam rangka melaksanakan misi yang ke tiga (III) dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab***, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Survey Kepuasan Anggota DPRD;
2. Survey Kepuasan Masyarakat; dan
3. Nilai AKIP.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 pada dasarnya merupakan Pedoman bagi seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya.

## DAFTAR ISI

|                                                                               | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                          | 1       |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                                      | 2       |
| DAFTAR ISI .....                                                              | 3       |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                                     | 4       |
| A. Tugas dan Peran Organisasi .....                                           | 4       |
| B. Keterkaitan RKT dengan Renstra .....                                       | 5       |
| <br>BAB II : RENCANA KINERJA TAHUNAN .....                                    | <br>6   |
| A. Tujuan Strategis .....                                                     | 6       |
| B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target Program<br>dan Kegiatan Pokok ..... | <br>7   |
| <br>BAB III : PENUTUP .....                                                   | <br>13  |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI**

#### **I. Data Umum**

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pada akhir tahun 2020, dalam rangka mengoptimalkan fungsi Sekretariat DPRD, terjadi perubahan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang program dan keuangan, tata usaha, hukum, kerja sama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi dan kepegawaian, serta rumah tangga di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
3. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA**

Rencana Kerja Tahunan (RKT ) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dalam penyusunan memperhatikan dokumen-dokumen rencana yang lain baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

1. Renstra yang menyangkut ketersediaan dokumen, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian. Keterkaitan dan konsistensi antar komponen dalam Renstra dan proses penyusunan dan data pendukung.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menyangkut ketersediaan dokumen, isi (sasaran beserta indikator output dan outcome serta targetnya, program, kegiatan beserta indikator input, proses, output, outcome) dan targetnya. Keterkaitan dan konsistensi komponen didalam RKT, keterkaitan dan konsistensi RKT dengan Renstra, proses penyusunan dan data pendukung.
3. Laporan Kinerja Tahunan, yang meliputi ketersediaan dokumen, isi (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan analisis mengenai capaian kinerja. Keterkaitan dan konsistensi komponen didalam Laporan Kinerja Tahunan, keterkaitan konsistensi Laporan Kinerja Tahunan dengan Renstra, RKT dan PK serta proses penyusunan dan data pendukung.

Adapun regulasi yang menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (RKT);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
6. RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023- 2026.



**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**A. TUJUAN STRATEGIS :**

Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2023 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam Tahun 2023 dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Program dan Pendanaan Indikatif yang tercantum dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 pada BAB VI. Tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka Sekretariat DPRD kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2023, adalah mendukung capain Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada :

Misi 3 : ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.***

Dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya pada Misi 3 tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, dan program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2023 sebagai berikut :

| No | Tujuan                                                                                                                        | Sasaran                                                                                                                           | Program                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. | 1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<br>2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD |
|    |                                                                                                                               | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi aspirasi masyarakat yang                                            | 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                                                                    |



|    |                                       |                                             |                                                                 |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                       | disampaikan kepada DPRD.                    |                                                                 |
| 2. | Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD | 1. Meningkatkan Nilai AKIP Sekretariat DPRD | 1. Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. |

## B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN POKOK.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan target kinerja tahunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada awal Tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

| No.       | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Anggaran      | Target Kinerja |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>I.</b> | <b>Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                      | 33,642,000    | <b>100 %</b>   |
| <b>1.</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</b>                                                                 | 29,558,000    | <b>100%</b>    |
| 1.        | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 17,532,000    | 16 Dokumen     |
| 2.        | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12,026,000    | 4 Laporan      |
| <b>2.</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                                                           | 4,239,418,909 | <b>100%</b>    |
| 1.        | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 4,124,856,909 | 37 orang       |
| 2.        | Sub Kegiatan Pelaksanaan                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi                                                                                                                  | 114,562,000   | 1 Dokumen      |

|    |                                                                                           |                                                                                                                         |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|    | Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                      | Keuangan SKPD                                                                                                           |             |            |
| 3. | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Jumlah Pelatihan yang Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi</b>    | 183,304,000 | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                     | 169,770,000 | 25 orang   |
| 2. | Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            | Jumlah Dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  | 13,534,000  | 8 Dokumen  |
| 4. | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>                                 | 441,503,455 | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 29,984,400  | 1 Paket    |
| 2. | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      | 386,519,055 | 18 Paket   |
| 3. | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                    | 25.000.000  | 3 Dokumen  |
| 5. | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b> | 500.000.000 | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                 | 400.000.000 | 25 Unit    |
| 2. | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                    | 100.000.000 | 5 unit     |
| 6. | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                      | <b>Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun</b>                   | 533,175,316 | 100 %      |
| 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 178.800.000 | 12 Laporan |
| 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 354,375,316 | 12 Laporan |
| 7. | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                                          | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang</b>                                                               | 633,492,200 | 100 %      |



|     | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                  | <b>Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>                                                                                                                                                            |                       |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                             | 128,600,400           | 2 Unit       |
| 2.  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                             | 345,246,000           | 22 Unit      |
| 3.  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                 | 73,114,200            | 84 Unit      |
| 4.  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                           | 86,531,600            | 3 Unit       |
| 8.  | <b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                      | <b>Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi</b>                                                                                                                                       | <b>27,081,548,120</b> | <b>100 %</b> |
| 1.  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD                                                                      | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                                                                                                                                                | 26,745,940,920        | 50 orang     |
| 2.  | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                                                                                                                                        | 288,411,000           | 1 Paket      |
| 3.  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                                                                                                                                                  | 47,196,200            | 50 orang     |
| II. | <b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>                                                                    | <b>Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)</b> | <b>18,690,000,000</b> | <b>100 %</b> |
| 1.  | <b>Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>                                                                         | <b>Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun</b>                                                                                                                                              | <b>3,557,454,700</b>  | <b>100 %</b> |
| 1.  | Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                         | 2,048,755,900         | 10 Dokumen   |



|    |                                                                                   |                                                                                                       |                      |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 2. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan                                                              | 500.000.000          | 1 Dokumen  |
| 3. | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 1,008,698,800        | 5 Dokumen  |
| 2. | <b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                                     | <b>Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun</b>                        | <b>2,933,703,400</b> | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 534,636,600          | 1 Dokumen  |
| 2. | Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 430,643,100          | 1 Dokumen  |
| 3. | Sub Kegiatan Pembahasan APBD                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 669,435,600          | 1 Dokumen  |
| 4. | Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                        | 509,327,600          | 1 Dokumen  |
| 5. | Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                       | 18,044,200           | 1 Dokumen  |
| 6. | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                       | 18,044,200           | 1 Dokumen  |
| 3. | <b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                           | <b>Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun</b>       | <b>1,480,731,000</b> | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                     | 240,260,000          | 24 Laporan |
| 2. | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                              | 218,339,000          | 24 Laporan |
| 3. | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                       | 205,289,000          | 24 Laporan |
| 4. | Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                               | 205,289,000          | 24 Laporan |
| 5. | Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                       | 113,017,000          | 1 Dokumen  |

|    |                                                                              |                                                                                                           |                      |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|    | Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                               | Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                                                            |                      |            |
| 6. | Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah | Jumlah dokumen pembahasan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang disusun                        | 498,537,000          | 1 Dokumen  |
| 4. | <b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                   | <b>Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun</b>                               | <b>3,579,951,400</b> | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pendalamam Tugas DPRD                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                | 1,800,372,000        | 4 Dokumen  |
| 2. | Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                 | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan                        | 242,364,000          | 5 Dokumen  |
| 3. | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                       | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                            | 324,000,000          | 9 orang    |
| 4. | Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                   | Jumlah tenaga ahli fraksi                                                                                 | 240.200.000          | 8 orang    |
| 5. | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                  | 538,983,400          | 11 dokumen |
| 6. | Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD                                   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                         | 434,032,000          | 1 dokumen  |
| 5. | <b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>              | <b>Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun</b> | <b>2.323.267.500</b> | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                             | Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun                                                      | 657.245.000          | 1 Dokumen  |
| 2. | Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses                                               | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                     | 1.666.022.500        | 1 Dokumen  |
| 6. | <b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                    | <b>Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun</b>                | <b>626.517.000</b>   | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                            | 626.517.000          | 1 Laporan  |
| 7. | <b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                        | <b>Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun</b>                            | <b>4.188.375.000</b> | 100 %      |
| 1. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                | Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                      | 2.907.628.000        | 7 Dokumen  |



|    |                                                                     |                                                                                |                |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2. | Sub Kegiatan<br>Penyusunan Laporan<br>Kinerja DPRD                  | Jumlah Laporan Fraksi,<br>Alat Kelengkapan dan<br>Kinerja DPRD yang<br>disusun | 147.835.000    | 21 Laporan |
| 3. | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi Pelaksanaan<br>Tugas Badan<br>Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan<br>Tugas Badan Musyawarah       | 789.954.000    | 12 Dokumen |
| 4. | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi Tugas<br>Pimpinan DPRD                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Tugas<br>Pimpinan<br>DPRD                   | 342.958.000    | 1 Dokumen  |
|    |                                                                     | <b>JUMLAH</b>                                                                  | 52.332.000.000 |            |

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan sasaran, program kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal ini yang paling penting atau mendasar dalam mencapai keberhasilan semua program dan kegiatan adalah terletak bagaimana semua hal yang telah direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara semaksimal mungkin dapat melaksanakan secara konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Secara teknis program dan kegiatan pada Tahun 2023 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dioperasionalisasikan melalui kegiatan-kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

BANJARNEGARA, 18 FEBRUARI 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, MPH

Pembina Tk.I

NIP. 19720819 200501